

KAJIAN KEMISKINAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF *GEOSPATIAL*

Sutomo dan Sakinah Fathrunnadi Shalihati

Staf Pengajar Pendidikan Geografi FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail: sakinah_fs@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Kajian penelitian dilatar belakangi oleh kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 % di Tahun 2011 dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, dan dari tingkat aksesibilitas, Kabupaten Purbalingga memiliki posisi wilayah yang paling menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten ditata kembang wilayah BARLINGMASCAKEB.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat dan distribusi kemiskinan, tingkat dan distribusi perkembangan wilayah, tingkat keselarasan antara distribusi tingkat kemiskinan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga secara spasial, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder. Unit analisisnya berupa desa-desa di Kabupaten Purbalingga. Teknik analisis kualitatif dengan bantuan *software* Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk analisis peta kemiskinan, peta perkembangan wilayah dan peta keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah tiap desa di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dilakukan uji lapangan dengan mengambil sampel desa kategori selaras, tidak selaras dan cukup selaras secara acak (*randoom*), melakukan analisis kecocokan maupun perbaikan hasil analisis data sekunder dengan kondisi sesungguhnya di desa sampel, sehingga diperoleh faktor-faktor yang mewakili perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Purbalingga mendominasi tingkat kemiskinan sedang 45,19%, tinggi 38,49%, dan rendah 16,32%. Distribusi kemiskinan tinggi banyak ditemukan di Kabupaten Purbalingga bagian utara yang didominasi perbukitan dan pegunungan. Tingkat Perkembangan wilayah desa-desa di Kabupaten Purbalingga mendominasi perkembangan wilayah sedang 74,48%, rendah 14,23%, dan tinggi 11,30%. Distribusi perkembangan wilayah tinggi banyak ditemukan di bagian selatan dengan kondisi morfologi datar. Tingkat Keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah desa-desa di Kabupaten Purbalingga mendominasi cukup selaras 53,56%, selaras 43,51%, dan tidak selaras 2,93%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten purbalingga adalah masih rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, upah dari mata pencaharian yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki dan kondisi morfologi yang cenderung berbukit dan berada pada daerah pegunungan dengan lereng-lereng terjal menjadikan banyak desa cukup sulit dalam kondisi sosial ekonomi dan aksesibilitas sehingga memicu tingginya kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengembangan Wilayah, *Geospatial*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tak kunjung terselesaikan di negara Indonesia hingga masa demokrasi saat ini, terbukti dengan masih banyaknya jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2011 persebaran penduduk miskin terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 56%, kemudian Pulau Sumatra 21%, Pulau Sulawesi bersama Pulau Bali dan Nusa

Tenggara masing-masing 7%, Pulau Papua 4%, Pulau Kalimantan 3%, sedangkan persebaran penduduk miskin paling rendah berada di Pulau Maluku sebesar 2 %.

Kemiskinan di Pulau Jawa sendiri, cukup bervariasi di tiap propinsinya, masih pada data BPS Nasional Tahun 2011, kemiskinan tertinggi terdapat di Propinsi Jawa Timur disusul Propinsi Jawa Tengah yang terpaut selisih 248.850 jiwa penduduk.

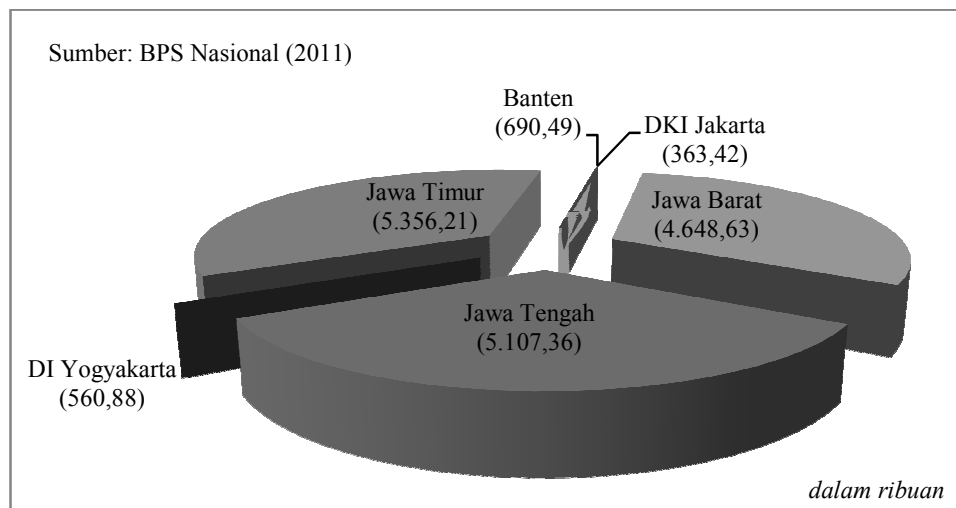
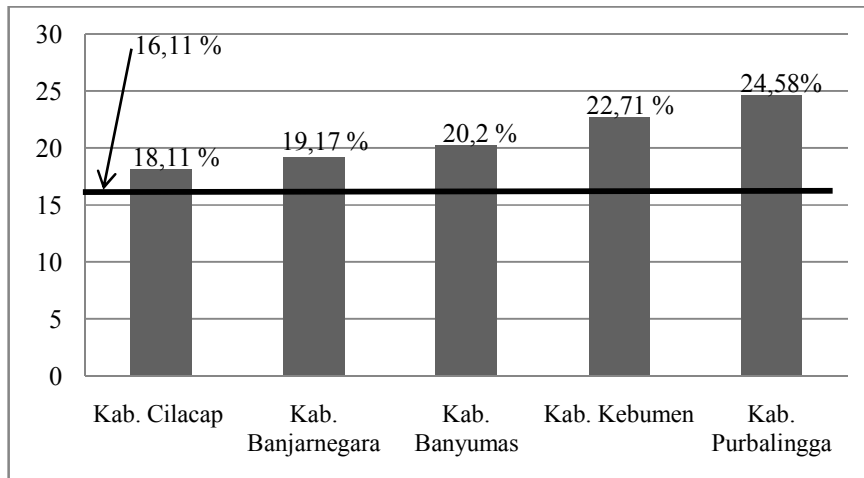


Diagram 1. Jumlah Penduduk Miskin tiap Propinsi di Indonesia Tahun 2011

Propinsi Jawa Tengah pada kenyataannya merupakan propinsi di Indonesia dengan perkembangan pembangunan wilayah yang pesat, salah satu paling menonjol menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2012, Propinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke 2 tingkat nasional dalam indeks iklim investasi pada Tahun 2008, dengan besaran prosentase 68,51 %. Peringkat ini nampaknya belum memberikan pengaruh yang signifikan terutama dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, terbukti masih terdapat 16 kabupaten dari 6 kota dan 29

kabupaten yang masuk dalam kategori sangat miskin karna tingkat kemiskinannya berada diatas angka standar kemiskinan tingkat Provinsi yaitu sebesar 16,11 % pada bulan Juli tahun 2010 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2012)

Perkembangan wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang makin menarik adalah perkembangan wilayah bagian barat, yaitu terdapat tata kembang kabupaten yang terintegrasi dengan sebutan BARLINGMASCAKEB yang merupakan kepanjangan dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen.



Sumber: Laporan Kinerja TKPK Provinsi Jawa Tengah (2011)

Diagram 2. Prosentase Jumlah Penduduk Miskin di BARLINGMASCAKEB Tahun 2011

Tata kembang kabupaten yang terintegrasi ini diharapkan mampu meningkatkan perkembangan kabupaten yang ada didalamnya secara bersama-sama, atau terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, baik sumberdaya alam maupun manusia, sehingga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang di dalamnya, namun hingga saat ini ke 5 kabupaten BARLINGMASCAKEB masih dalam kategori kabupaten sangat miskin di Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten paling tertinggi dengan nilai kemiskinannya di BARLINGMASCAKEB adalah Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 % di Tahun 2011, dari prosentase tersebut sangat diperlukan penanganan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Purbalingga hingga mencapai target *Millenium Development Goals* (MDG's) di Tahun 2015, yaitu menyisakan jumlah penduduk miskin 7,5% dari jumlah penduduk disuatu wilayah. Mengingat jika ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, pada periode 1995-2002, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, dan diitinjau dari tingkat

aksesibilitas, Kabupaten Purbalingga memiliki posisi wilayah yang paling menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya (Gunawan dan Gunawan, 2008)

Lokasi strategis dan perkembangan yang cepat selayaknya mampu menjadi modal utama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, semisal dengan penambahan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang didukung oleh aksesibilitas, sehingga mudah dijangkau. Sama halnya dengan pendapat Astuti dan Musiyam (2006), salah satu pendekatan permasalahan kemiskinan adalah ketidakmampuan kelompok miskin untuk menjangkau fasilitas pelayanan dasar, baik pelayanan sosial maupun pelayanan ekonomi, untuk itu perlu sarana maupun prasarana yang memudahkan terjangkaunya pelayanan secara *spasial* bagi kelompok miskin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tingkat kelarasan antara perkembangan wilayah meliputi ketersediaan layanan sosial, ekonomi dan aksesibilitas dengan kemiskinan dilihat dari sudut pandangan *geospasial*, dan mengkaji pula faktor yang mempengaruhi

tingkat keselarasan tersebut di Kabupaten Purbalingga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang didukung pengolahan datanya dengan menggunakan *software* Sistem Informasi Geografi (SIG), bertujuan untuk membuat gambaran *geospatial* situasi secara faktual mengenai faktor-faktor yang saling terkait berdasarkan data statistik yang berhubungan dengan kemiskinan, fasilitas sosial, ekonomi dan aksesibilitas Kabupaten Purbalingga.

A. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa data jumlah rumah tangga miskin perdesa, aksesibilitas wilayah, jumlah dan persebaran fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi yang meliputi: keberadaan pasar, pelayanan jasa keuangan dan perdagangan.

Adapun pengolahan data dilakukan dengan teknik skoring. Teknik skoring digunakan untuk menentukan klasifikasi tingkat kemiskinan berdasarkan rasio antara jumlah rumah tangga miskin dengan total rumah tangga penduduk per desa. Selanjutnya skoring juga digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah, yang diperoleh dari akumulasi nilai skor fasilitas sosial, ekonomi dan aksesibilitas.

B. Tahap Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara interpretasi peta distribusi tingkat kemiskinan dan perkembangan wilayah. Analisis ini dengan menggunakan teknik Sistem Informasi Geografi (SIG). Dalam penelitian ini dilakukan analisis keselarasan, untuk mengetahui

hubungan asosiatif antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah.

Analisis keselarasan dilakukan untuk mengetahui hubungan lebih lanjut, keterkaitan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah. Diasumsikan bahwa untuk desa-desa yang mempunyai hubungan **selaras**, jika perkembangan wilayah rendah dengan tingkat kemiskinan tinggi, perkembangan wilayah sedang dengan tingkat kemiskinan sedang dan perkembangan wilayah tinggi dengan tingkat kemiskinan rendah. Hubungan yang **tidak selaras**, jika perkembangan wilayah tinggi dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan perkembangan wilayah rendah dengan tingkat kemiskinan rendah. Hubungan **cukup selaras** terjadi, jika perkembangan wilayah sedang dengan tingkat kemiskinan rendah, perkembangan wilayah rendah dengan tingkat kemiskinan sedang, perkembangan wilayah tinggi dengan tingkat kemiskinan sedang dan perkembangan wilayah sedang dengan tingkat kemiskinan tinggi. Analisis keselarasan dalam penelitian mengambil cara yang sama seperti analisis keselarasan dari penelitian Astuti dan Musiyam (2006).

C. Tahap Uji Lapangan

Setelah diperoleh distribusi *geospatial* desa-desa di Kabupaten Purbalingga dengan kategori selaras, tidak selaras dan cukup selaras antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah, selanjutnya dilakukan uji lapangan dengan mengambil sampel 1 desa kategori selaras, tidak selaras dan cukup selaras secara acak (*randoom*), kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada kepala desa yang menjadi sampel. Hal ini bertujuan untuk melakukan kecocokan maupun perbaikan hasil analisis data sekunder dengan kondisi sesungguhnya di desa-

desa tersebut, dan memperoleh pula faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rumah Tangga Miskin

Data rumah tangga miskin menurut hasil program Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2012, menghasilkan 4 (empat) kategori miskin sebagai berikut :

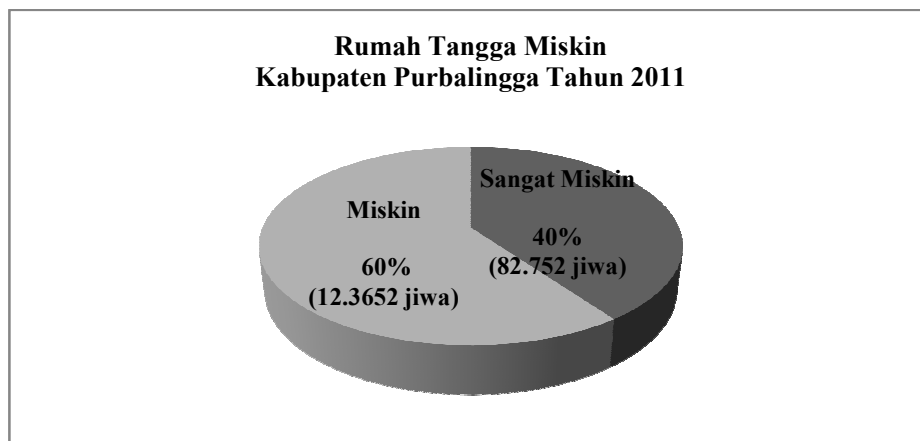
1. Kelompok sangat miskin atau penduduk yang rata-rata pengeluarannya dibawah 0,8 kali garis Kemiskinan,
2. Kelompok miskin yaitu penduduk yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan,
3. Kelompok hampir miskin yaitu penduduk yang pengeluarannya diatas garis kemiskinan tetapi dibawah 1,2 kali garis

kemiskinan dan yang terakhir adalah

4. Kelompok rentan miskin yaitu penduduk dengan rata-rata pengeluaran dibawah 1,7 kali garis kemiskinan tetapi diatas 1,2 kali garis kemiskinan.

Rumah tangga miskin hanya dibatasi pada kelompok sangat miskin dan kelompok miskin saja, sedangkan kelompok hampir miskin dan rentan miskin belum dimasukkan dalam kategori rumah tangga miskin, dan tiap rumah tangga diasumsikan olah TNP2K Tahun 2012 terdapat 4 orang. Diketahui pula batas garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 210.349,- per kapita per bulan.

Jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Purbalingga sejumlah 859.741 jiwa, 24% diantaranya merupakan rumah tangga miskin (51.601 rumah tangga atau sekitar 206.404 jiwa penduduk). Rumah tangga miskin di Kabupaten Purbalingga disajikan pada Diagram 4.



Sumber: Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional

Diagram 3. Rumah Tangga Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2011

Sedangkan proporsi tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengacu pada ketentuan kriteria penilaian kategori miskin PPLS Tahun 2011 yang telah dikeluarkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 yaitu:

1. Tingkat kemiskinan tinggi jika prosentase rasio rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga pada suatu desa > 26,23%

2. Tingkat kemiskinan sedang jika prosentase rasio rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga pada suatu desa antara 13,35% hingga 26.23%

3. Tingkat kemiskinan rendah jika prosentase rasio rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga pada suatu desa < 13,35%

Hasil jumlah desa dan prosentase pada masing-masing tingkat kemiskinan disajikan pada Tabel 1.

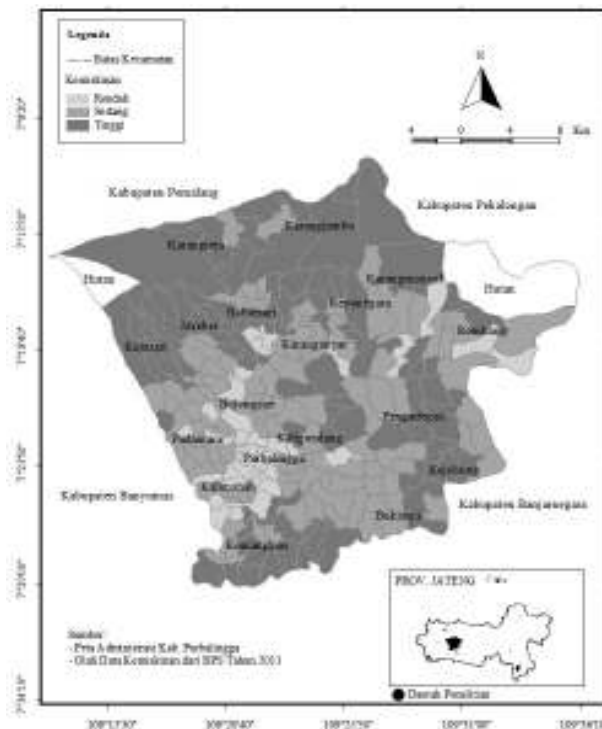
Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

Tingkat Kemiskinan	Jumlah Desa	Prosentase
Rendah	39	16,32
Sedang	108	45,19
Tinggi	92	38,49
Jumlah	239	100.0

Sumber: Olah Data PPLS dan Kecamatan dalam Angka Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 1, tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga didominasi kategori sedang. Untuk

distribusi secara spasial tingkat kemiskinan telah disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Kemiskinan tiap desa di Kabupaten Purbalingga

B. Fasilitas Sosial dan Ekonomi

Data distribusi fasilitas dan ekonomi diseluruh desa di Kabupaten Purbalingga yang diperoleh dari berbagai instansi dilakukan pemilahan

variabel, pengklasifikasian pada masing-masing variabel dan skoring yang diperinci Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Fasilitas Sosial dan Ekonomi Kabupaten Purbalingga

No.	Variabel	Klasifikasi	Skor
1.	Fasilitas Pendidikan	TK/RA/BA	1
		SD/MI	2
		SMP/MTS	3
		SMA/MA/SMK	4
		PT	5
2.	Fasilitas Keseharan	Tempat Praktek Dokter/Bidan Praktek Mandiri	1
		Puskesmas Pembantu	2
		Puskesmas Perawatan	3
		Poliklinik Swasta/PKD/Polindes	4
		Rumah Sakit	5
3.	Fasilitas Keuangan	BUUD/KUD	1
		Koperasi	2
		BKD	3
		Bank	4
		Lumbung Desa	5
4.	Fasilitas Perdagangan dan Industri	Restoran/Rumah Makan/Kedai	1
		Toko/Warung/Kios/PKL non Makan	2
		Pertokoan	3
		Pasar Tradisional	4
		Industri Kecil/Menengah/Besar	5

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

Sedangkan hasil jumlah desa dan prosentase tingkat fasilitas sosial

ekonomi di Kabupaten Purbalingga disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Fasilitas Sosial dan Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Tingkat Sosial Ekonomi	Jumlah Desa	Prosentase
Rendah	52	21.8
Sedang	165	69.0
Tinggi	22	9.2
Jumlah	239	100.0

Sumber: Olah Data dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Industri, Kecamatan dalam Angka Tahun 2011

Tingkat ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh tingkat

sedang dengan jumlah desa 165 dari 239 desa.

C. Aksesibilitas Wilayah

Aksesibilitas wilayah Kabupaten Purbalingga diklasifikasikan menjadi

yaitu Jalan Desa, Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi, seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Aksesibilitas Kabupaten Purbalingga

No.	Variabel	Klasifikasi	Skor
	Fasilitas Pendidikan	Jalan Desa	1
		Jalan Kabupaten	2
		Jalan Propinsi	3

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder

Tingkat Aksesibilitas pada unit desa di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh tingkat sedang, untuk

prosentase lebih rinci dijabarkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Aksesibilitas Kabupaten Purbalingga

Tingkat Aksesibilitas	Jumlah Desa	Prosentase
Rendah	12	5.0
Sedang	191	79.9
Tinggi	36	15.1
Jumlah	239	100.0

Sumber: Olah Data dari BAPPEDA dan Dinas Pekerjaan Umum

D. Perkembangan Wilayah

Tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga didasarkan dari total skoring keberadaan fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas, diklasifikasikan menjadi 3 yaitu rendah, sedang dan tinggi,

Kriteria penilaian tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga pada penelitian ini adalah:

1. Tingkat perkembangan wilayah tinggi jika prosentase rasio penjumlahan skor fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas terhadap skor total pada suatu desa $> 50\%$, diasumsikan bahwa fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas sebagian besar telah memadai.

2. Tingkat perkembangan sedang jika prosentase rasio penjumlahan skor fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas terhadap skor total pada suatu desa antara 25% hingga 50% , diasumsikan bahwa fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas cukup memadai.

3. Tingkat perkembangan wilayah rendah jika prosentase rasio penjumlahan skor fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas terhadap skor total pada suatu desa $< 25\%$, diasumsikan bahwa fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas belum cukup memadai.

Hasil prosentase dan jumlah desa dimasing-masing tingkat perkembangan wilayah ditampilkan pada Tabel 6.

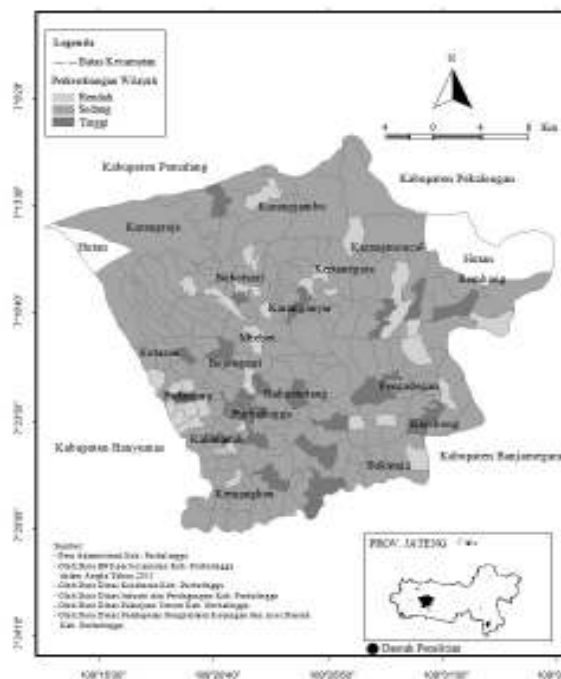
Tabel 6. Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga

Tingkat Perkembangan Wilayah	Jumlah Desa	Prosentase
Rendah	34	14,23
Sedang	178	74,48
Tinggi	27	11,30
Jumlah	239	100.0

Sumber: Olah Data

Distribusi secara spasial tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten

Purbalingga telah disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Perkembangan Wilayah tiap desa di Kabupaten Purbalingga

E. Tingkat Keselarasan

Tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tidak

selaras, cukup selaras dan selaras, untuk hasil prosentase dan jumlah desa dimasing-masing tingkat keselarasan ditampilkan pada Tabel 7.

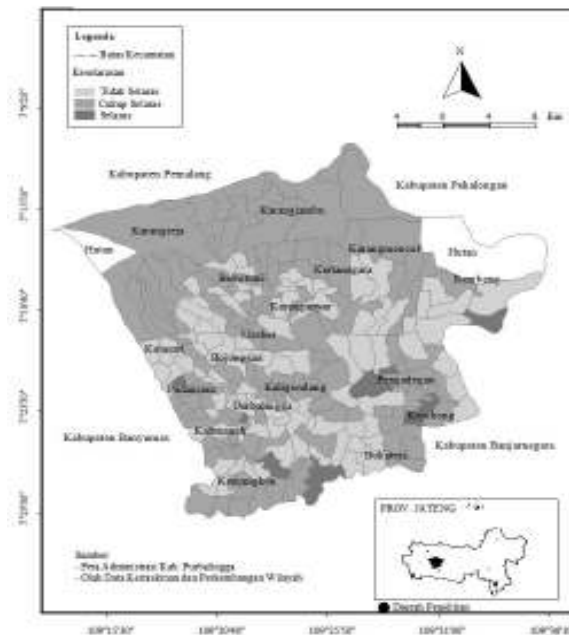
Tabel 7. Tingkat Keselarasan antara Kemiskinan dengan Perkembangan Wilayah di Kabupaten Purbalingga

Tingkat Keselarasan	Jumlah Desa	Prosentase
Tidak Selaras	7	2,93
Cukup Selaras	128	53,56
Selaras	104	43,51
Jumlah	239	100.0

Sumber: Olah Data

Tingkat keselarasan antara kemiskinan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi cukup selaras dan selaras, dengan jumlah prosentase yang

hampir sama. Secara spasial distribusi tingkat keselarasan di Kabupaten Purbalingga telah disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Keselarasan antara Kemiskinan dengan Perkembangan Wilayah tiap desa di Kabupaten Purbalingga

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keselarasan

Hasil uji lapangan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan antara kondisi kemiskinan dan perkembangan wilayah yang ada di desa sampel, dijabarkan sebagai berikut:

1. Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang

Merupakan desa tingkat perkembangan wilayah sedang, kemiskinan sedang dan tingkat keselarasan yaitu selaras. Menurut data Kecamatan Rembang dalam Angka 2010 (BPS, 2011) Desa Gunungwuled memiliki luas 563 Hektar, 6 dusun dan dihuni sejumlah 4.675 penduduk.

a) Total penduduk yang masuk dalam kategori miskin menurut

data PPLS Tahun 2011 sejumlah 1.084 dari 4.675 penduduk dengan rasio 0,232 atau 23,2 %, dimana termasuk dalam kategori kemiskinan sedang.

b) Kondisi perkembangan wilayah Desa Gunung Wuled sebagai berikut: dilihat dari sosial ekonominya terdapat fasilitas pendidikan 2 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar dan 2 Madrasah Ibtida'iyah, fasilitas kesehatan terdapat 1 tempat bidan praktek mandiri, 1 puskesmas pembantu dan 4 poliklinik desa, dan fasilitas perdagangan berupa pasar desa dan kios kelontongan yang dimiliki secara perorangan.

Sedangkan aksesibilitas yang dimiliki Desa Gunung Wuled tergolong sedang, meski kondisi alam yang rawan gerakan masa yang mengakibatkan longsor namun seluruh jangkauan desa ini telah teraspal, dan penduduk mampu menyediakan alat transportasi



Gambar 4. Suasana Permukiman di Desa Gunung Wuled Kecamatan Rembang (Foto diambil tanggal 24 Februari 2013 pukul 15.00)



Gambar 5. Sebagian Kondisi Jalan di Desa Gunung Wuled Kecamatan Rembang (Foto diambil tanggal 24 Februari 2013 pukul 15.30)

- c) Faktor yang mempengaruhi keselarasan antara kemiskinan sedang dengan perkembangan wilayah sedang di Desa Gunung Wuled Kecamatan Rembang adalah: Meski desa ini berada di daerah pengunungan namun kondisi sosial perekonomian cukup maju, terbukti dengan ditemukannya aktivitas pasar desa yang lengkap, fasilitas pendidikan hingga tingkat SLTP mudah ditemukan, dan banyak penduduk desa yang merantau untuk berdagang di luar kota maupun luar Jawa, yang kemudian membawa hasil untuk membangun desa, hanya sebagian kecil memanfaatkan lahan dengan berkebun dan mengelola sawah.

2. Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong

Merupakan desa tingkat perkembangan wilayah rendah, kemiskinan sedang dan tingkat keselarasan yaitu cukup selaras. Menurut data Kecamatan Kejobong dalam Angka 2010 (BPS, 2011) memiliki luas 224,934 Hektar, 5 dusun dengan jumlah penduduk 1.960 jiwa.

- a) Total penduduk yang masuk dalam kategori miskin menurut data PPLS Tahun 2011 sejumlah 442 dari 1.960 penduduk dengan rasio 0,216 atau 21,6 %, dimana termasuk dalam kategori kemiskinan sedang.
- b) Kondisi perkembangan wilayah Desa Kedarpan sebagai berikut: dilihat dari sisi sosial ekonomi didalamnya terdapat fasilitas

pendidikan 2 Taman Kanak-kanak dan 2 Sekolah Dasar, fasilitas kesehatan terdapat 4 polinik desa, tidak terdapat fasilitas keuangan dan fasilitas perdagangan hanya berupa kios kelontongan yang dimiliki secara individual/perorangan. Sedangkan kondisi aksesibilitas yang dimiliki Desa Kedarpan tergolong rendah, dikarenakan hanya memiliki jalan desa, terdapat pula sebagian jalan di desa kedarpan yang menghubungkan dengan desa yang lain dalam kondisi belum

teraspal sejauh 1, 4 kilometer karena kondisi medan yang berupa perbukitan bergelombang, berada di rumah tangga 1 dan 3. didukung pula dengan ketidak tersedianya angkutan desa, kebanyakan penduduk sangat mengandalkan transportasi ojek ataupun sepeda motor. Disimpulkan dari olah data soaial ekonomi dan aksesibilitas, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong termasuk memiliki perkembangan wilayah rendah.



Gambar 6. Salah satu kondisi rumah penduduk Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong (Foto diambil tanggal 2 Februari 2013 pukul 16.30)



Gambar 7. Salah satu kondisi ruas jalan penghubung antar desa yang berbukit bergelombang di Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong (Foto diambil tanggal 2 Februari 2013 pukul 16.30)

c) Faktor yang mempengaruhi ke cukup selarasan antara kemiskinan sedang dengan perkembangan wilayah rendah di Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong adalah:

1) Latar belakang pendidikan penduduk yang rata-rata pendidikan hanya menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dikarenakan akses menuju SLTP dan

SMA/SMK ditempuh cukup jauh dari desa ini, rata-rata dengan bersepeda atau menumpang pada keluarga yang lebih mampu. Desa ini tidak terdapat angkutan desa sebagai sarana transportasi masal, sehingga membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak dalam biaya transportasi ke akses sekolah yang lebih tinggi.

- 2) Dengan pendidikan yang terbatas mengakibatkan sebagian besar penduduk di desa bekerja sebagai buruh tani di lahan yang banyak digunakan untuk menanam tebu, sebagai tukang kayu atau buruh di pabrik kayu bagi kaum laki-laki, sedangkan bagi kaum perempuan di desa ini banyak yang bekerja di plasma (industri rumah tangga di bawah binaan industri bulu mata) sekitar 100 orang.
- 3) Kondisi akses jalan belum teraspal, berbukit, bergelombang dan becek dimusim hujan, menjadi salah satu kendala tersendiri

untuk masyarakat beraktivitas sosial ekonomi.

3. Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan

Merupakan desa dengan tingkat perkembangan wilayah tinggi, kemiskinan tinggi dan tingkat keselarasan yaitu tidak selaras. Menurut data Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2010 (BPS, 2011) Desa Pengadegan memiliki luas 668,997 Hektar, 6 dusun dengan jumlah penduduk 8.811 jiwa.

- a) Total penduduk yang masuk dalam kategori miskin menurut data PPLS Tahun 2011 sejumlah 2.508 dari 8.811 penduduk dengan rasio 0,285 atau 28,5 %, dimana termasuk dalam kategori kemiskinan tinggi.



Gambar 8. Kondisi pasar yang berada ditepi jalan kabupaten di Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan (Foto diambil tanggal 24 Februari 2013 pukul 16.30)



Gambar 9. Salah satu kondisi pemanfaatan lahan di Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan (Foto diambil tanggal 24 Februari 2013 pukul 16.55)

- b) Kondisi perkembangan wilayah Desa Pengadegan sebagai berikut: dilihat dari sisi sosial ekonomi didalamnya terdapat fasilitas pendidikan 7 Taman Kanak-kanak dan 5 Sekolah Dasar, 3 Madrasah Ibtidaiyyah, 1 Sekolah

Menengah Pertama dan 1 Madrasah Tsanawiyah, fasilitas kesehatan terdapat tempat 1 praktek dokter dan bidan, 3 puskesmas pembantu dan 4 polinik desa, fasilitas yang berperan dalam keuangan berupa Koperasi Unit Desa, 3

- koperasi, 1 Badan Kridit Desa dan 1 Bank dan untuk fasilitas perdagangan terdapat pasar dan industri bulu mata. Sedangkan kondisi aksesibilitas Desa Pengadegan terdapat jalan desa dan jalan kabupaten yang telah teraspal. Disimpulkan dari olah data sosial ekonomi dan aksesibilitas, Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan termasuk memiliki perkembangan wilayah tinggi.
- c) Faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan antara kemiskinan tinggi dengan perkembangan wilayah tinggi di Desa Pengadegan adalah:
- 1) Meski tingkat perkembangan wilayah tinggi, berada di jalur yang dilewati jalan kabupaten, namun banyak diantara penduduk, terutama kaum laki-laki bekerja dengan upah yang rendah bekerja sebagai tukang bangunan,

ataupun menjadi buruh tani tegalan maupun buruh harian dengan upah Rp. 35.000/hari adapula yang merantau sebagai buruh bangunan diluar daerah, untuk. Hanya sedikit yang mengembangkan ternak jenis ayam dan kambing secara kelompok.

- 2) Latar belakang pendidikan penduduk yang rata-rata hanya menamatkan pendidikan tingkat pertama, kemudian putus sekolah karna keterbatasan biaya dan tergiur dengan upah pabrik menjadikan banyak diantara kaum perempuan muda bekerja sebagai buruh industri bulu mata.
- 3) Sedangkan kaum perempuan yang telah lanjut usia lebih banyak bekerja sebagai buruh tani maupun hanya tinggal di rumah.



Gambar 10. Pusat Perguruan Muhammadiyah di Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan (Foto diambil tanggal 24 Februari 2013 pukul 17.05)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan prosentase tertinggi untuk kategori penduduk paling miskin yaitu 24,58%.
2. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat kemiskinan sedang dengan jumlah desa 108, kemudian tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah desa 92, dan tingkat kemiskinan rendah terdapat 39 desa.
3. Tingkat Perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat perkembangan wilayah sedang dengan jumlah desa 178, kemudian tingkat perkembangan wilayah tinggi terdapat 27 desa, dan tingkat perkembangan wilayah rendah dengan jumlah 34 desa.
4. Tingkat Keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat cukup selaras terdapat 128 desa, kemudian tingkat selaras dengan jumlah desa 104, dan tingkat tidak selaras dengan jumlah 7 desa.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten purbalingga adalah kemiskinan banyak dipicu oleh pendidikan yang rendah dan mata pencaharian sebagai buruh terutama kaum laki-laki karna tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai di desa, sedangkan faktor penghambat perkembangan wilayah yaitu banyak desa yang berkategori miskin berada di daerah pegunungan, karna keterbatasan berkembangnya aksesibilitas dan terhambatnya sosial ekonomi terutama di Kabupaten Purbalingga bagian utara,

dipastikan dalam penelitian ini bahwa faktor alam juga menentukan suatu wilayah untuk berkembang.

B. Saran

1. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam penyelamat kemiskinan di suatu wilayah, karna diharapkan pendidikan yang tinggi mampu memberikan masa depan yang lebih terjamin, maka dengan itu Kabupaten Purbalingga perlu melakukan strategi yang jitu dalam wajib pendidikan hingga sekolah menengah atas/kejuruan.
2. Bagi desa-desa yang berkategori miskin sangat memerlukan program yang meningkatkan kemandirian semisal mencari potensi keunggulan desa tersebut untuk dikembangkan atau menjadi daya tarik investasi dari luar daerah.
3. Adanya komunikasi yang baik, tindakan nyata yang jujur dan bekerjasama dari masyarakat bersama *top stakeholder* ke *down stakeholder* atau sebaliknya, diharapkan mampu menyelamatkan seluruh elemen masyarakat dari kemiskinan dan perkembangan wilayah yang tertinggal

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti dan Musiyam. 2006. *Kemiskinan dan Perkembangan Wilayah di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Geografi Tahun 2007.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1999. *Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1997-1999 Metode BPS*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. 2011. *Kecamatan Kejobong dalam Angka 2010*.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. 2011. *Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. 2011. *Kecamatan Rembang dalam Angka 2010*.
- BAPPENAS - ADB TA 4762-Ino: Pro-Poor Planning & Budgeting. 2005. *Kartu Penilaian Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. Buku III: Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. *Bahan Sidang Kabinet*.
- Gunawan dan Gunawan. 2008. *Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten-Kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43.
- Pabundu Tika, Moh. 1997. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2012. *Laporan Kinerja TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011*.
- BPS Nasional (2010). [Http://Sp2010.Bps.Go.Id/](http://Sp2010.Bps.Go.Id/). Diakses tanggal 2 Juli 2013
- TNP2K. 2012. <http://tnp2k.go.id>. Diakses tanggal 25 Februari 2013
- TKPK Provinsi Jawa Tengah. 2013. <http://tkpkjateng.com/>. Diakses tanggal 15 Juni 2013
- BPS Nasional (2011). <http://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 2 Juli 2013